

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SERTA KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIPALSUKAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 212/PDT/2018/PT.MKS)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



Oleh:

Fitria Sukmawati

217191011

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2022

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : **Fitria Sukmawati**
NIM : **217191011**

**JUDUL TESIS:
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SERTA KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIPALSUKAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR 212/PDT/2018/PT.MKS)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan **LULUS** dalam sidang ujian tanggal 17 Januari 2022, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

- 1. Ketua Penguji : Prof. Mella Ismelina, F.R., S.H.**
- 2. Anggota Penguji : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**

Jakarta, 26 Januari 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS SERTA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIPALSUKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 212/PDT/2018/PT.MKS)

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh dan mencapai gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk, pengarahan, bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Alexander Wijaya, S.H., M.Kn., selaku Notaris yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.

5. Ibu Nurwahidah Zakaria Isnaini, S.H., selaku Notaris yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.
6. Para Dosen Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doanya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar, dan tepat waktu.
9. Saudara penulis yang selalu memberikan dukungan serta doanya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas semua jasa baik tersebut penulis berdoa agar ilmu yang telah diberikan pada penulis, mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari tesis ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Januari 2022

Penulis

Fitria Sukmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TEORI TANGGUNG JAWAB, TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN TEORI TINDAK PIDANA	34
A. Teori Tanggung Jawab	34
B. Teori Kepastian Hukum	44
C. Teori Penegakan Hukum	59
D. Teori Tindak Pidana	73

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	86
A. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	86
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	104
C. Studi Putusan Nomor: 212/Pdt/2018/PT. MKS.	117
D. Wawancara	130
BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM	
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIPALSUKAN OLEH	
NOTARIS	134
A. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Akta Otentik Yang	
Dipalsukan Oleh Notaris Dalam Studi Putusan Nomor:	
212/PDT/2018/PT.MKS	134
B. Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik Yang	
Dipalsukan Oleh Notaris Dalam Studi Putusan Nomor:	
212/PDT/2018/PT.MKS	158
BAB V PENUTUP	165
A. Kesimpulan	165
B. Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	167
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	153
LAMPIRAN	155

ABSTRAK

- (A) Nama : Fitria Sukmawati
(B) Judul Tesis : Tanggung Jawab Hukum Notaris Serta Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Dipalsukan (Studi Putusan Nomor: 212/PDT/2018/PT.MKS)
(C) Halaman : ix + 166 halaman + 2021
(D) Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Kepastian Hukum, Akta Otentik.
(E) Isi :

Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata seperti notaris. Notaris dan PPAT merupakan suatu profesi hukum yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum, mengingat notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik maupun dibawah tangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris dan PPAT adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, PPAT harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Kode Etik PPAT. Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Realita yang ada dan banyak terjadi di dalam masyarakat adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan keinginannya demi mendapatkan keuntungan dan/atau pun memudahkan prosesnya, beberapa orang menempuh proses dengan menghalalkan segala cara bahkan menyalahi aturan hukum. Banyak Para Pihak atau salah satu pihak yang memberikan data, informasi dan keterangan palsu atau tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Notaris dan atau PPAT dalam pembuatan akta otentik. Dalam penulisan ini juga penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai Putusan Nomor: 212/Pdt/2018/PT. Mks. dimana ada suatu kasus tentang Notaris yang melakukan pemalsuan akta dengan cara mengubah data-data dala, pembayaran sehingga tidak sesuai dengan aturan yang ada baik itu UUJN maupun Kode Etik. Hal ini tentunya bisa saja menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap akta otentik yang dipalsukan oleh notaris dalam Studi Putusan Nomor: 212/PDT/2018/PT.MKS? Bagaimana kepastian hukum terhadap akta otentik yang dipalsukan oleh notaris dalam Studi Putusan Nomor: 212/PDT/2018/PT.MKS? Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Tanggung jawab seorang Notaris dapat dibedakan menjadi: Tanggung Jawab Perdata; Tanggung Jawab Pidana; Tanggung Jawab Administratif. Pemberian sanksi terhadap Notaris juga merupakan upaya perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

- (F) Acuan : 53 (1992-2016), 2 Peraturan Perundang-undangan, 6 Kamus, 5 Karya Terjemahan, 4 Artikel/Jurnal dan 4 Internet.
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
(H) Penulis : Fitria Sukmawati

ABSTRACT

- (A) Name : *Fitria Sukmawati*
 (B) Thesis Title : *Legal Responsibilities of Notaries and Legal Certainty Against Forged Authentic Deeds (Study of Decision Number: 212/PDT/2018/PT.MKS)*
 (C) Page : *ix + 166 page + 2022*
 (D) Keyword : *Legal Responsibility, Legal Certainty, Authentic Deeds.*
 (E) Content :

One of the jobs that offers services in the field of law, especially civil law, such as a notary. Notaries and PPATs are legal professions that are very influential in the legal system, considering that notaries and PPATs are public officials authorized to make an authentic or private deed. Thus it can be said that notaries and PPAT are one of the pillars of law enforcement in Indonesia. In carrying out his position as a public official, PPAT must always be guided by Government Regulations and the PPAT Code of Ethics. Notaries are always depicted as carrying out social functions, being responsible and having good integrity and morals, and upholding the nobility and dignity of their positions. The reality that exists and happens a lot in society is to realize what their goals and desires are in order to gain profits and/or facilitate the process, some people go through the process by justifying all means and even violating the rule of law. Many Parties or one of the parties who provide data, information and information that is false or not in accordance with the reality to a Notary and or PPAT in making an authentic deed. In this writing, the author will also analyze further regarding Decision Number: 212/Pdt/2018/PT. Mks. where there is a case of a Notary who falsifies the deed by changing the data in the payment so that it is not in accordance with the existing rules, both UUN and the Code of Ethics. This of course can cause losses for certain parties. What is the legal responsibility for authentic deeds falsified by a notary in the Decision Study Number: 212/PDT/2018/PT.MKS? How is the legal certainty of the authentic deed falsified by a notary in the Decision Study Number: 212/PDT/2018/PT.MKS? The research method used by the researcher is a normative legal or normative juridical research method. The responsibilities of a Notary can be divided into: Civil Liability; Criminal Liability; Administrative Responsibilities. The imposition of sanctions against Notaries is also an effort to protect the law and legal certainty for the community.

- (F) Reference : *53 (1992-2016), 2 Regulations, 6 Dictionary, 5 Translatiton Work, 7 Article/Journal and 4 Internet.*
 (G) Lecturer : *Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.*
 (H) Author : *Fitria Sukmawati*